

Pesantren Sebagai Penangkal Radikalisme dan Terorisme

Ari Prayoga, Mohammad Sulhan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ariprayoga@madrasah.id

Abstrak: Dewasa ini pembahasan radikalisme sering kali dikaitkan dengan umat Islam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadi pondasi umat untuk menyebarkan perdamaian dan memperkenalkan kepada *ukhuwah islāmiyyah* di kalangan pesantren. Tulisan ini bermaksud menawarkan gagasan tentang upaya meningkatkan peran pesantren sebagai benteng untuk menangkal berkembangnya paham maupun aksi radikal di lingkungan mereka. Gagasan ini dirumuskan berdasarkan atas tiga hal: pertama, filosofi dan tradisi pesantren; kedua, fakta yang ditemukan seputar paham yang berkembang di pesantren; dan ketiga, analisa tentang tahapan maupun factor-faktor yang bisa menjadikan seseorang yang memiliki paham radikal bisa terseret ke dalam tindakan radikal.

Kata kunci: Pesantren, penangkal radikalisme, paham radikal.

Abstract: Today the discussion of radicalism is often associated with Muslims. The pesantren as an Islamic educational institution is the foundation of the ummah to spread peace and introduce to Islamic brothers and sisters among the pesantren. This paper intends to offer ideas on efforts to increase the role of pesantren as a stronghold to counter the development of radical understanding and action in their environment. This idea was formulated based on three things: first, the philosophy and tradition of pesantren; second, facts found about the understanding that developed in pesantren and third, the analysis of the stages and factors that can make someone who has a radical understanding can be dragged into radical actions.

Keywords: Islamic boarding school, antidote to radicalism, radical ideology.

Pendahuluan

Gerakan-gerakan Islam radikal¹ selalu ada hubungannya dengan cara mereka memaknai jihad terutama dalam rangka melawan kemungkarannya atau apa yang mereka anggap ketidakadilan. Gerakan Islam radikal juga selalu ada hubungannya dengan agenda politik praktis atau politik kekuasaan dalam pengertian merebut, mempertahankan atau menghancurkan kekuasaan yang dinilai akan menghalangi tercapainya agenda politik mereka. Dalam rangka merebut kekuasaan, atau mendirikan

¹ Radikalisme yang dimaksud disini meliputi (1) kelompok keagamaan yang menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan agama, (2) kelompok keagamaan yang menginginkan berdirinya Negara Islam dan (3) kelompok keagamaan yang menginginkan dikembalikannya Piagam Jakarta atau menginginkan agar negara diberi otoritas untuk memaksakan syariat Islam kepada umat Islam.

Negara Islam mereka tidak segan-segan untuk menggunakan berbagai cara termasuk cara-cara kekerasan dan tindakan kriminal.

Meskipun bukan satu-satunya tempat untuk merekrut pengikut, pesantren merupakan salah satu tempat yang menjadi sasaran gerakan radikal dalam merekrut pendukungnya. Hal inilah yang tampaknya menjadi kekhawatiran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Nasarudin Umar. Nasaruddin Umar dalam pembukaan rakernas Maarif Nahdlatul Ulama di Bandung, Jumat 22 Januari 2010 mengungkapkan fenomena kehidupan keagamaan yang perlu diwaspadai, yaitu peningkatan kecenderungan radikalisme keyakinan beragama. “Dalam lima tahun terakhir, jumlah pesantren yang radikal dari tiga buah menjadi tiga ratus buah,” katanya. Ia juga memaparkan fakta bahwa 45 persen takmir masjid di Jakarta masih menganggap Piagam Jakarta layak dipertahankan dan NKRI bukan bentuk final, 16 persen responden juga berpendapat Amrozi mati syahid.²

Secara historis, Jawa Barat memang merupakan salah satu daerah yang pernah menjadi basis perjuangan untuk merebut kekuasaan dan mendirikan Negara Islam³. Diduga sejumlah umat Islam di Jawa Barat disadari atau tidak masih mengembangkan paham keagamaan konservatif khususnya diseperti jihad dan kekuasaan yang bisa dinilai sebagai bentuk legitimasi dari penggunaan kekerasan atau yang sejalan dengan cita-cita politik kelompok Islam radikal. Meskipun paham radikal tidak selalu melahirkan aksi-aksi radikal, namun penerimaan sebagian masyarakat terhadap paham semacam ini bisa dijadikan titik masuk bagi kelompok radikal untuk memprovokasi mereka untuk melakukan tindakan radikal.⁴

Pembahasan tentang filosofi pesantren diambil dari sejumlah literatur yang membicarakan tentang pesantren khususnya pesantren modern Gontor. Fakta seputar paham yang berkembang di pesantren diperoleh melalui penelitian survey yang dilakukan oleh penulis sendiri di sejumlah pesantren di Bandung.⁵ Tahapan atau faktor yang bisa menjadikan

² Lihat NU online, Jumat 22 Januari 2010.

³ Lihat C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafitipers, 1987).

⁴ Bukti bahwa pesantren termasuk salah satu lembaga pendidikan Islam yang rawan dari ideologi teroris bisa ditunjukkan oleh Nasir Abbas melalui simulasi yang diperagakannya di hadapan para santri pada saat melakukan penyuluhan bersama Azyumardi Azra. Dalam simulasi itu, ia bisa merekrut santri dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah itu ia kembalikan kesadaran mereka sambil menjelaskan bahwa teroris sering menggunakan metode semacam ini dalam merekrut anggota. Lihat “Group warns Islamic school student against terrorism”, *The Jakarta Post* (15 Mei 2010).

⁵ Jumlah pesantren yang ada di kota Bandung adalah 129 pesantren dengan jumlah santri mukim dan kalong (tidak menginap di asrama) sebanyak 27.026 santri (data dari Kandepag Kota Bandung). Dari 129 pesantren yang ada 73 pesantren atau 57% di antaranya masuk kategori pesantren Salafiyah, 35 pesantren atau 27% masuk kategori Khalafiyah dan sisanya 21 pesantren atau 16% dikategorikan sebagai kombinasi. Tidak semua pesantren

seseorang yang berpaham radikal benar-benar terlibat dalam aksi-aksi radikalisme maupun terorisme⁶ diambil dari analisa sejumlah pakar yang tertulis di berbagai media maupun buku.

Filosofi dan tradisi pesantren

Abdurrahman Wahid dalam bukunya "Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren" menyebut tiga nilai utama yang lazim dikembangkan dalam pesantren. Nilai utama yang pertama adalah nilai ibadah, maksudnya, cara memandang kehidupan secara keseluruhan sebagai ibadah. Nilai kedua yang muncul adalah kecintaan yang tinggi pada ilmu pengetahuan agama. Ilmu dan ibadah lalu menjadi identik sehingga muncul kecintaan yang mendalam pada ilmu-ilmu agama sebagai nilai utama yang berkembang di pesantren. Kecintaan ini dimanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti penghormatan seorang santri yang sangat dalam kepada ahli-ahli ilmu agama, kesediaan berkorban dan bekerja keras untuk menguasai ilmu-ilmu tersebut, dan kerelaan bekerja untuk nantinya mendirikan pesantrennya sendiri sebagai tempat menyebarkan ilmu-ilmu itu, tanpa menghiraukan rintangan yang mungkin akan dihadapinya dalam kerja tersebut. Nilai utama ketiga yang berkembang di pesantren adalah keikhlasan atau ketulusan bekerja untuk tujuan-tujuan bersama.⁷

Para kiai seringkali menghubungkan ihsan dengan watak ikhlas. Keikhlasan adalah ajaran Islam yang paling tinggi, Kiai Abdul Jalil menunjukkan tiga tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas yang paling rendah adalah keikhlasan seorang muslim yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agama hanya karena adanya perintah. Tingkatan ikhlas kedua adalah keikhlasan seorang muslim yang melaksanakan amalan ibadah

dijadikan responden dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya mengambil sekitar 10 pesantren saja dengan masing-masing pesantren diambil dua responden sehingga jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Pilihan terhadap 10 buah pesantren diambil secara purposif dengan mempertimbangkan wilayah, tempat pesantren berada, jumlah santri yang menetap di pesantren itu serta jenis atau tipe pesantrennya. Pesantren yang dijadikan responden diusahakan tidak berasal dari wilayah kecamatan yang sama, memiliki santri yang cukup banyak serta meliputi tiga tipe yakni tradisional (salafiyah), modern (khalafiyah) dan kombinasi. Dan mengingat paham radikal dalam Islam sering berpusat pada ajaran seputar jihad, kekerasan dan kekuasaan, maka fokus penelitian ini juga seputar jihad, kekerasan dan kekuasaan dalam pandangan pesantren yang berada di sekitar Bandung.

⁶ PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menggambarkan terorisme sebagai berikut: "terrorism as any act intended to cause death or serious bodily harm to civilian or noncombatants with the purpose of intimidating a population or compelling a government or an international organization to do or abstain from doing any act." Lihat *The Jakarta Post Youth Speak*, Vol. 2 (September 2009).

⁷ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 97-100.

bukan karena semata-mata menjalankan kewajiban, melainkan karena telah menjadi kebutuhan hidupnya. Tingkatan ikhlas ketiga adalah keikhlasan seorang muslim yang mengerjakan ibadah ritual dan sosial semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.⁸

Nilai keikhlasan ini terus menjadi karakter pesantren meskipun pesantren itu menamakan diri sebagai pesantren modern. Pondok Modern Gontor menyebut lima nilai, yang dikembangkannya sebagai Panca Jiwa: jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari (*self-help*), jiwa *ukhuwwah diniyyah* yang demokratis, dan jiwa bebas.

Berdasarkan jiwa dan semangat di atas, Pondok Modern Gontor menanamkan empat moto yang diharapkan dapat dimiliki oleh para santrinya. Adapun empat motto tersebut adalah sebagai berikut: berbudi baik, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Pondok Modern Gontor melihat bahwa di antara semangat kebebasan, seperti diuraikan sebelumnya, kebebasan berpikir merupakan yang paling fundamental. Akan tetapi, berpikiran bebas ini tidak harus dimaknai bebas sebebas-bebasnya, tanpa prinsip dan dasar. Sebaliknya, kebebasan di sini dipandang sebagai simbol kematangan dan kedewasaan, dan itupun harus dilakukan setelah seseorang berbudi tinggi dan memiliki pengetahuan luas. Laksana mujtahid, seseorang harus berakhlak mulia dan menguasai ilmu, baru dibolehkan berijtihad. Berdasarkan motto ini, Nurcholish Madjid menilai Pondok Modern Gontor sebagai lembaga pendidikan “liberal.”⁹

Nasionalisme dan Demokrasi di Pesantren

Semangat kebangsaan atau nasionalisme adalah semangat yang pada umumnya dipelihara oleh kalangan pesantren. “*Hubb al-waṭan min al-īmān*” adalah hadis yang populer di kalangan umat Islam. Nahdlatul Ulama (NU), organisasi masa tempat sebagian besar pesantren di Indonesia menyatakan afiliasinya, dalam sejarah berdirinya didasarkan atas tiga fondasi, yang salah satunya adalah semangat kebangsaan. Ketiga fondasi itu adalah: kebangkitan bangsa (*nahdlatul wathan*), membangun kecerdasan bangsa (*tashwirul afkar*) dan kebangkitan ekonomi bangsa (*nahdlatu al-tujjar*).

Seperti diuraikan sebelumnya, Pondok Modern Gontor juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini. Ini tercermin, misalnya, dari penerimaan mereka terhadap Pancasila, yang menjadi Dasar Negara Indonesia. Menurut K.H. Imam Zarkasyi,¹⁰ hubungan antara agama dan Pancasila sudah jelas, di mana sila pertama,

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 146-147.

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1988), 208.

¹⁰ Panitia Penyusun, *K.H. Imam Zarkasyi dari Gontor* (t.tp: t.p., t.th), 446-7.

“Ketuhanan Yang Maha Esa,” menjiwai seluruh empat sila lainnya. Karena Tuhan Yang Maha Esa itu satu sesuai dengan keyakinan umat Islam, maka sila itu sesungguhnya adalah tauhid. Jadi tidak ada yang salah. Yang terpenting, baginya, bukan sekadar membicarakan Pancasila, tetapi menghayati dan mengamalkannya, dan mengamalkan Pancasila tidak lain dan tidak bukan adalah mengamalkan agama itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, yang menyimpang dari Pancasila akan mendapatkan hukuman dari Yang Maha Esa.

Ketika Pondok Modern Gontor dituduh tidak Pancasilais, K.H. Imam Zarkasyi malah balik bertanya, sila mana yang tidak ada di pesantren ini. Ketuhanan Yang Maha Esa dipraktikkan setiap hari, keadilan juga dilaksanakan dengan menegakkan disiplin yang sama terhadap siapa pun, tak terkecuali putra kiai sendiri. Bahkan sila Persatuan Indonesia telah meresapi pesantren ini sebelum ikrar Sumpah Pemuda, dengan menempatkan para santri yang berasal dari berbagai suku dan daerah tidak dalam satu kelompok. Semua itu dimaksudkan untuk menyamakan tarikan nafas bahwa Indonesia itu satu, sekaligus sebagai sikap anti-kesukuan.

Konsekuensi dari penerimaan Pancasila dan NKRI adalah menjalankan dan mengamalkannya yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Jika di pesantren tertentu, Pancasila dan Indonesia haram dinyanyikan, dan Merah Putih dilarang dikibarkan, di Pondok Modern Gontor malah sebaliknya. Indonesia Raya selalu mengawali kegiatan dan upacara penting, yang dilanjutkan dengan hymne ‘Oh Pondokku.’ Demikian pula Merah Putih, yang selalu dikibarkan dan disandingkan dengan bendera pesantren yang berwarna Merah Putih Hijau. Tak terkecuali Pancasila, yang selalu mendahului kegiatan kepramukaan atau upacara peringatan hari-hari nasional.

Jadi, hubungan agama dan negara seperti itu, jika diamati dari pola pemikiran yang ada, dapat dikelompokkan ke dalam bentuk akomodasionis, sebagai imbingan dari bentuk integralis dan sekularis.¹¹ Semboyan “Berdiri di atas dan untuk semua golongan” tidak hanya berlaku dalam bidang keagamaan, tetapi juga berlaku dalam bidang politik. Pada saat yang sama, pesantren Gontor tidak mengarahkan atau membatasi santri pada karier tertentu, sehingga politik juga termasuk bidang yang sah untuk dilakoni. Karena itu, menjadi politisi tidak diharamkan, dan afiliasi politik santri menjadi netral, dalam arti bahwa mereka bebas memilih partai yang disukai sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Namun, sikap netral itu juga harus dibarengi dengan semangat *ukhuwwah*, bahwa perbedaan afiliasi tetap dalam persaudaraan.

¹¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), 1-2; Ahmad Tafsir, “Negara Sekuler Yang Mementingkan Agama,” dalam ‘Ali ‘Abdur Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), v-vi.

Berdasarkan prinsip itu, para alumni Pondok Modern Gontor tersebar dalam berbagai partai politik yang ada, seperti Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan lain sebagainya. Dengan memasuki partai-partai itu, mereka tetap membawa jiwa *ukhuwwah* di samping semangat sebagai perekat umat. Aspek penting lain dalam politik adalah kepemimpinan. Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi, para santri ditempa untuk siap menjadi pemimpin, sehingga semboyan yang diungkapkan di Gontor adalah “siap memimpin dan siap dipimpin.” Dalam semboyan itu terkandung makna, bahwa kekuasaan bukanlah segala-galanya. Bahwa pengabdian itu tidak selalu muncul dari pemimpin, anggota pun dapat memberikan pengabdian. Namun, ketika terpilih sebagai pemimpin, alumni Pondok Modern Gontor harus siap menerimanya sebagai amanah.

Oleh karena itu bila dilihat dari teori hubungan antara agama dan negara, Gontor sebenarnya cenderung ke pemikiran bersatunya agama dan negara. Tapi agama yang dimaksud di sini bukan dalam arti institusinya tapi dalam arti nilainya. Adapun bila dilihat dari teori tentang hubungan penguasa dan rakyat, pesantren ini mendukung dan mempraktekkan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan mereka. Secara umum kiranya bisa dikatakan bahwa paham dan sikap politik pondok Gontor adalah moderat, demokratis dan non partisan.

Fakta Problematik Seputar Pandangan Pesantren

Bila dilihat dari filosofi pesantren, maka fakta seputar pandangan kalangan pesantren seputar jihad, kekerasan dan kekuasaan bisa dipandang sebagai fakta yang problematik. Fakta-fakta seputar pandangan kalangan pesantren tentang jihad, kekerasan dan kekuasaan mungkin bisa disebut *inconvenient truth* (kenyataan yang tidak enak, problematik). Problematika pandangan pesantren seputar jihad bisa dilihat, misalnya, 25% kalangan pesantren menyetujui bahwa untuk kepentingan dakwah, umat Islam perlu mempersiapkan diri dengan kekuatan senjata. Kalangan pesantren juga banyak yang menilai mereka yang terlibat dalam tindakan terorisme sebagai mujahid. 35% dari mereka setuju bila Osama bin Laden (pimpinan al-Qaeda) yang dianggap bertanggungjawab atas serangan World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 disebut pejuang atau mujahid. Meskipun sudah divonis dan dihukum mati karena terbukti terlibat dalam tindakan terorisme di Indonesia, Amrozi, Imam Samudra, dan kelompoknya masih pantas disebut pejuang/ mujahid menurut 10% kalangan pesantren.

Problematika pandangan pesantren seputar kekerasan dalam agama bisa dilihat misalnya pada pandangan kalangan pesantren tentang hukuman bagi murtad, pezina, pencuri, jamaah Ahmadiyah serta kaum

Kristiani. Banyak kalangan pesantren (40%) yang masih mempertahankan pendapat lama yang membolehkan orang murtad untuk dihukum mati. Pandangan konservatif ini mengakibatkan mereka terkadang bersikap ambivalen. Di satu sisi, misalnya, mereka mendukung bahwa tidak ada paksaan dalam agama, tetapi di sisi lain, mereka juga menyetujui adanya hukuman mati terhadap orang murtad. Padahal pendapat ini disamping sudah banyak yang menyangkal atau mengkritisnya karena tidak sejalan dengan hak asasi manusia juga sebenarnya tidak sejalan dengan semangat yang diajarkan oleh Alquran. 75% dari mereka juga setuju bila pezina dihukum cambuk atau rajam. 65% dari mereka setuju bila pencuri dihukum dengan hukuman potong tangan.

Terhadap aliran Ahmadiyah, 80 % kalangan pesantren setuju menyebut aliran ini sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan dan karenanya tidak berhak menyebut dirinya sebagai muslim. 40% diantara mereka bahkan berpendapat bahwa mengusir atau menghancurkan jamaah Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya merupakan bagian dari amar makruf nahi munkar.

Kekerasan bernuansa agama juga bisa muncul dalam masalah pembangunan tempat ibadah agama lain terutama pembangunan gereja. 65% kalangan pesantren setuju bila gereja atau tempat beribadah orang Kristen/ Katolik yang dibangun tanpa izin harus dihancurkan atau ditutup. Dilihat dari luar, persoalan teknis perizinan tampak seperti persoalan utamanya, tapi kalau dilihat lebih jauh persoalannya sebenarnya tidak semata teknis perizinan tapi memang adanya sikap penolakan terhadap kehadiran gereja. 35% kalangan pesantren berpandangan bahwa Umat Islam harus menolak permohonan izin membangun gereja di wilayah. Pandangan seperti meskipun tidak selalu membuahkan kekerasan fisik, tapi yang jelas menunjukkan adanya sikap intoleransi dalam agama. Intoleransi ini terlihat juga pada ketidaksiapan kalangan pesantren untuk sekedar mengucapkan selamat natal atau menghadiri undangan perayaan natal. 80% kalangan pesantren menyetujui pandangan yang melarang umat Islam mengucapkan selamat natal atau menghadiri undangan perayaan natal yang diselenggarakan oleh umat Kristiani.

Kekerasan atas nama agama juga bisa muncul dari sensitifitas umat Islam terhadap apa yang mereka anggap sebagai penghinaan terhadap Islam, Alquran atau Nabi Muhammad. 70% kalangan pesantren menyatakan persetujuannya untuk menghukum mati orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Islam, Alquran atau Nabi Muhammad. Pandangan diskriminatif juga masih tampak di dunia pesantren. Ditemukan bahwa 85% dari mereka menyetujui bila Islam mestinya dijadikan syarat bagi kepala negara. 70 % kalangan pesantren juga setuju bila non-Muslim di Indonesia diperlakukan sebagai kafir *dhimmī*. 40%

kalangan mereka juga tidak setuju bila wanita maju menjadi kepala negara.

Banyak juga kalangan pesantren yang secara tidak langsung menyetujui pandangan teroris yang menganggap Indonesia masuk wilayah *dār al-ḥarb* (wilayah perang) atau bukan *dār al-islām* (wilayah damai). Jumlah mereka yang mendukung pandangan ini cukup signifikan yakni 25 persen. Dalam fikih klasik, seorang Imam berkewajiban untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang non-Muslim. Pilhan bagi non-Muslim yang menjadi sasaran dakwah kalau tidak mau menerima Islam hanya ada dua: tunduk sebagai kafir *dhimmī* dengan *jizyah* atau diperangi. Dalam fikih klasik juga ditemukan pandangan yang pada dasarnya membagi dunia hanya kepada dua yakni Darul Islam dan Darul Harbi. Kalau bukan wilayah damai berarti wilayah perang. Meskipun sistem khilafah yang sering diusung oleh Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) cenderung teokratis, namun dukungan umat Islam terhadap khilafah ini cukup tinggi. Dukungan ini ternyata tidak selalu dibarengi dengan penolakan terhadap Pancasila. Terbukti, meskipun 45% kalangan pesantren mendukung, namun hanya 25% saja yang menolak Negara Pancasila sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam.

Problem yang muncul seputar penyelenggaraan negara juga terlihat dalam pandangan kalangan pesantren berikut ini. 85% kalangan pesantren menghendaki agar negara ikut bertanggung jawab dalam melarang, menutup atau membubarkan aliran keagamaan yang sudah dinilai sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). 70% kalangan pesantren menghendaki negara ikut bertanggung jawab agar umat Islam menjalankan syariat agamanya.

Fakta Positif yang Bisa Dijadikan Modal

Meskipun pandangan yang disebutkan di atas menandakan sisi problematik atau sisi konservatif dari kalangan pesantren, namun hasil survey juga menunjukkan sisi positif yang bisa dikembangkan dari pandangan pesantren. Misalnya, pada saat mereka ditanya tentang mana jihad yang lebih paling penting, jihad *akbar* atau ijjihad *asghar*, 95% dari mereka menjawab bahwa *jihad akbar* lebih penting. Seluruh pimpinan pesantren (100%) bahkan setuju bahwa memerangi kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan umat Islam adalah jihad yang diperlukan untuk masa kini. Seluruh pimpinan pesantren (100%) juga setuju bila dalam agama tidak dibolehkan adanya paksaan. Artinya orang tidak boleh dipaksa masuk agama tertentu atau dipaksa keluar dari agama tertentu. Agama memang perlu diamankan dengan kesadaran, bukan dengan kekerasan. Agama memang wajar bila didakwahkan tetapi dakwah itu mesti dengan hikmah bukan dengan pedang.

Dukungan terhadap demokrasi dan nasionalisme juga tinggi. 70% kalangan pesantren setuju bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 80% berpandangan bahwa nasionalisme bisa bersinergi atau sejalan dengan semangat ajaran Islam. 60 % kalangan pesantren juga setuju untuk menjadikan Negara Pancasila sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam di Indonesia.

Tahapan Yang Dilalui Seorang Untuk Menjadi Radikal dan Faktor yang Mempengaruhinya

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa penelitian ini didasarkan pada asumsi semakin banyak umat Islam yang mendukung ideologi politik kelompok radikal maka potensi konflik dan kekerasan akan semakin tinggi dan masa depan ideologi Pancasila dan demokratisasi di Indonesia akan semakin suram. Dan seperti membenarkan sinyalemen yang dikemukakan oleh Dirjen Bimas Islam, Nasarudin Umar, bahwa paham yang dianut oleh kelompok radikal ternyata mendapat dukungan dari sebagian kalangan pesantren.

Berangkat dari asumsi di atas, maka jelas bahwa penelitian survey yang dilakukan di sejumlah pesantren di sekitar Bandung menemukan fakta-fakta problematik yang berkaitan dengan pandangan sejumlah pimpinan pesantren. Ada persetujuan atau dukungan signifikan dari kalangan pesantren terhadap paham yang dianggap radikal. Memang belum tentu orang atau kelompok yang memiliki paham radikal akan melakukan tindakan radikal. Diperlukan tahapan atau faktor lain yang menjadikan seseorang berani atau terpaksa bertindak radikal atau menjadi teroris. Menurut Noor Huda Ismail, peneliti tentang kekerasan politik yang juga alumni pesantren Ngruki Jawa Tengah, secara sosiologis, keterlibatan Muslim sebagai terrorist bisa melalui berbagai tangga/tahapan pergaulan sosial.

Tahap pertama, sejumlah individu memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka adalah korban dari ketidakadilan. Mereka kemudian mencoba mencari solusi. Pada saat solusi tidak didapatkan mereka mencoba naik ke tahapan atau tangga berikutnya. Pada tahap kedua, mereka mencoba mengidentifikasi factor eksternal yang dinilai bertanggung jawab atas ketidak adilan yang mereka hadapi. Mereka yakin bahwa faktor eksternal itu memiliki agenda untuk menghancurkan mereka secara sistematis. Kesimpulan ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, mereka adalah orang-orang jelek (*bad people*), oleh karenanya penggunaan kekerasan terhadap mereka bisa dibenarkan (*justified*). Kedua mereka kemudian diberi label sebagai “*evil*” (setan) yang berarti

menempatkan mereka sebagai *subhumans* (bukan lagi manusia).¹² Mereka yang berkumpul di tangga kedua ini kemudian berbaur dengan mereka yang memiliki perasaan sama. Mereka kemudian mengarahkan kemarahannya terhadap musuh bersama. Pada tahap ketiga, muncullah ikatan moral kelompok (*group's moral bond*). Mereka mendiskusikan bagaimana mempersiapkan mental dan fisik sebelum terlibat dalam aktifitas kekerasan fisik terhadap musuh. Diskusi ini dilakukan secara sembunyi. Pimpinan terus menekankan pentingnya loyalitas terhadap organisasi dan berusaha mengisolasi diri dari masyarakat. Proses rekrutmen sesungguhnya terjadi pada tangga atau tahapan keempat. Di sini teroris membagi dunia menjadi dua bagian yang saling bertentangan yakni mereka versus kami. Mereka hanya mengenal orang yang berada di selnya tidak mengenal sel lain. Pada tahap kelima, anggota yang terpilih dilatih untuk melaksanakan serangan terror. Di sisi ini tidak ada lagi kesempatan atau peluang untuk turun kembali. Mereka menerima perlakuan spesial dari pimpinannya. Misalnya, mereka diberi kesempatan untuk menengok keluarga atau meninggalkan pesan untuk mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Dani Dwi Permana.¹³

Itulah sebabnya, Musthafa Abd Rahman, dalam tulisannya yang berjudul *Mengapa Penganut Al-Qaeda Tidak Surut?* sembari mengakui bahwa ideology atau proyek jihadi yang menjadi faktor penting, ia menyebut beberapa variable atau persepsi keliru terkait dengan faktor yang menjadikan seseorang menjadi radikal, atau lebih tepatnya menjadi teroris. Wacana variabel yang selama ini dipercaya sebagai faktor-faktor bagi bersemainya radikalisme menurutnya tidak tepat. Variabel pertama adalah bersemainya radikalisme sering dikaitkan dengan kemiskinan dan kebodohan. Wacana ini sangat dipercaya di dunia Barat dalam memandang fenomena kekerasan dan radikalisme selama ini.

Akan tetapi, realita di lapangan, mereka yang tertarik bergabung dengan jaringan Al-Qaeda sebagian besar justru berasal dari keluarga berada, kelas atas atau menengah, dan mengenyam pendidikan modern. Contohnya adalah pria asal Nigeria, Umar Farouk Abdulmutallab, yang berupaya meledakkan pesawat Northwest Airlines yang gagal saat mendarat di Detroit dari Amsterdam pada 25 Desember 2009. Abdulmutallab adalah putra seorang bankir kaya di Nigeria. Ia juga dikenal cerdas, mengenyam pendidikan di London sebelum belajar bahasa Arab di Yaman.

¹² Sebelum tahun 1537, saat Paus Paul III menyatakan bahwa orang-orang Indian juga memiliki jiwa seperti manusia, mereka dipandang layaknya binatang buas yang sah untuk diburu. Lihat Jennie S. Bev, "Doubt and why good people do bad things," *The Jakarta Post* (September 23, 2010).

¹³ Noor Huda Ismail, *The Jakarta Post Youth Speak*, Vol. 2 (September 2009).

Agen ganda Al-Qaeda asal Jordania, Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, berprofesi sebagai dokter dan terkenal pintar sehingga mendapat beasiswa dari Pemerintah Jordania saat belajar kedokteran di Turki. Al Balawi melakukan aksi serangan bom bunuh diri yang menewaskan tujuh agen CIA di pangkalan AS di Provinsi Khost, Afganistan Timur, 30 Desember 2009.

Secara strata sosial ekonomi, Abdulmutallab dan Al Balawi sama seperti pendahulunya, Muhammad Atta dan Ziad al Jarrah (pelaku serangan teroris 11 September 2001 di AS) dan juga sebelumnya, pucuk pimpinan Osama bin Laden dan Ayman Thawahiri. Bahkan, pendiri Tanzim Al-Qaeda, Sheikh Abdullah Azzam, yang berasal dari Palestina adalah seorang profesor universitas Islam internasional di Islamabad, Pakistan. Karena itu, masalah utama bukan karena soal kaya dan miskin atau pintar dan bodoh, melainkan lebih pada doktrin dari mentor atau keyakinan sehingga mereka rela melakukan serangan bunuh diri.

Variabel kedua, teks-teks ajaran agama dan kurikulum sekolah agama di dunia Islam kerap dituduh sebagai faktor pendorong perilaku radikalisme. Wacana ini dipercaya cukup kuat di dunia Barat dan bahkan juga di dunia Islam. Karena itu, para ulama terkemuka Islam sering turun tangan dengan memberi penafsiran yang moderat atas teks-teks ajaran agama agar dapat mengeringkan sumber kekerasan dan radikalisme. Namun yang mengejutkan, sebagian besar loyalis Al-Qaeda papan atas berlatar belakang pendidikan sipil modern, bukan salaf (agama). Mereka tidak belajar di lembaga pendidikan Al Azhar di Mesir atau sekolah agama di Arab Saudi dan Pakistan, tetapi di lembaga pendidikan Barat seperti Abdulmutallab, Al Balawi, dan Muhammad Atta. Karena itu, persoalan bukan pada teks ajaran agama atau kurikulum sekolah agama, melainkan kondisi sosial politik yang buntu di sebagian besar dunia Arab dan Islam. Kebuntuan kondisi sosial politik itu membuka peluang lahirnya penafsiran radikal terhadap teks-teks ajaran agama dalam upaya mencari legitimasi untuk mengubah keadaan. Hal itu bisa dilihat pada karya-karya Sayyid Qutub di Mesir dan Abul Ala Maududi di Pakistan. Karya-karya Sayyid Qutub khususnya sering dijadikan referensi kelompok-kelompok radikal.

Variabel ketiga sering dikatakan bersemainya perilaku radikalisme bagi para pemuda Arab dan Muslim lantaran mereka menolak atau tidak mampu berintegrasi dengan kehidupan modern yang didominasi peradaban Barat. Namun, kasus Abdulmutallab, Al-Balawi, dan Muhammad Atta adalah mereka produk pendidikan modern dan beberapa waktu hidup di negara Barat atau di lingkungan yang berorientasi ke Barat, seperti Al-Balawi yang beberapa tahun hidup di Turki. Persoalannya bukan hubungan Islam dan modernitas, tetapi lebih pada perasaan inferior, krisis identitas, dan rasa kesia-siaan sehingga mereka bergabung dengan Al-Qaeda.

Variabel keempat adalah masalah kerancuan semantik. Pejabat dan media Barat sering mengidentikkan Tanzim Al-Qaeda dengan paham konservatif atau salaf. Padahal, tidak semua penganut paham salaf dengan sendirinya anggota Al-Qaeda. Jika AS dan Barat memvonis semua penganut paham salaf adalah Tanzim Al-Qaeda, maka mereka tidak akan memenangi peperangan karena harus berhadapan dengan jutaan manusia di Afganistan, Pakistan, Yaman, Somalia, dan negara lain. Padahal, anggota jaringan Al-Qaeda jumlahnya ratusan di setiap negara. Jika ada penganut salaf klasik bergabung dengan jaringan Al-Qaeda, maka ia bisa disebut Salafi Jihadi dan sudah meninggalkan paham salaf klasiknya.

Karena itu, AS dan Barat harus membedakan antara pengikut jaringan Al-Qaeda dan lainnya sehingga dalam memburu mereka tidak salah sasaran, agar tidak menambah musuh dan semakin menuai kebencian terhadap AS. Analisis Timur Tengah asal Inggris, Patrick Seale, mengatakan, AS dan Barat hendaknya tidak hanya menggunakan pendekatan militer atau menggelontorkan bantuan ke negara tertentu atau membuka latihan antiteroris di Pakistan dan Yaman dalam menghadapi jaringan Al-Qaeda, tetapi juga memberi prioritas pada pendekatan politik dan ekonomi. Menurut Seale, tingginya angka pengangguran di dunia Arab dan Islam, adanya rezim korup dan diktator, serta tiadanya keadilan mengantarkan banyak pemuda Arab dan Islam mengangkat senjata melawan AS dan sekutunya. Di Yaman misalnya, problema tidak hanya ada pada jaringan Al-Qaeda, tetapi juga pada pemerintah Presiden Ali Abdullah Saleh yang harus lebih membuka keran demokrasi, menegakkan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁴

Upaya Peningkatan Peran Pesantren dalam Menekan Tumbuhnya Gerakan Radikalisme dan Terorisme Di Indonesia

Secara sosiologis, ada kemiripan antara gerakan kaum teroris dengan gerakan mereka yang meyakini ideology totalitarian di Barat seperti fascism dan komunisme. Kemiripan itu menurut Munajat bisa dilihat dari tiga sisi. Pertama, kedua gerakan ini menggunakan bahasa pengawal, pembela /pelindung/kaum revolusioner untuk mendefinisikan dirinya dan menggunakan bahasa kaum imperialis, kapitalis, kolonialis untuk menyebut musuhnya. Kedua, kedua gerakan ini sama-sama menggunakan kekerasan tanpa pandang bulu. Pada dasarnya tidak berbeda cara pembunuhan yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan bin Laden. Ketiga, mereka sama-sama mengagungkan kematian. Jose Millan Astray, seorang jenderal pro Nazi

¹⁴ Musthafa Abd Rahman, "Mengapa Penganut Al-Qaeda Tidak Surut?," *KOMPAS*, 17 Januari 2010.

mengeksploitasi konsep *viva la muerta*, atau “long live death,” sementara bin Laden mengeksploitasi konsep syahid atau martyrdom.¹⁵

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa aksi radikalisme dan terorisme bisa terjadi karena berbagai faktor salah satunya memang doktrin keagamaan. Tetapi doktrin keagamaan bukan menjadi faktor utama.¹⁶ Kalangan pesantren memang masih banyak yang memegang cara pandang keagamaan salaf yang konservatif. Cara pandang salaf yang konservatif memang bisa menyulitkan mereka yang hidup dalam Negara kebangsaan seperti Indonesia. Tetapi karena factor yang paling penting adalah bagaimana mencari kebuntuan dalam menghadapi persoalan politik dan ekonomi, maka pesantren sebenarnya bisa ikut berperan dalam mengurangi radikalisme di Indonesia bila mereka bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan politik yang demokratis dan pembangunan ekonomi berorientasi kerakayatan yang bermuara pada keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa kelompok radikal dan teroris selalu menentang cara-cara demokratis dalam mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu dukungan yang kongkrit terhadap proses demokratisasi yang ada di Indonesia akan sangat membantu dalam menekan kelompok radikal. Sebab seradikal apapun ideologi suatu gerakan, bila mereka menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang didalamnya termasuk prinsip hukum dan hak asasi manusia, maka sebenarnya sudah tidak lagi radikal. Sebab prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat untuk bermusyawarah atau bernegosiasi dalam mengatur wilayah publik. Prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat untuk bisa menerima hanya sebagian dari apa yang diinginkannya. Prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat bahwa dalam urusan pengaturan Negara, kedaulatan mesti diserahkan kepada rakyat. Prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat untuk bebas menentukan pilihan hidup sesuai dengan hati nuraninya dan toleran terhadap perbedaan.

Dukungan yang tinggi terhadap demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan nasionalisme, juga bisa dijadikan modal oleh pesantren untuk menangkal munculnya gejala radikalisme di lingkungan pesantren. Gagasan demokrasi didukung oleh 70% kalangan pesantren, gagasan NKRI didukung oleh 75% kalangan pesantren, gagasan tentang Pancasila sebagai ideology Negara didukung oleh 60% kalangan pesantren, gagasan nasionalisme didukung oleh 80% kalangan pesantren. Pandangan kalangan pesantren yang menganggap

¹⁵ Munajat, “Debunking myths of terrorism,” *The Jakarta Post* (September 8, 2009).

¹⁶ Ahmad Najib Burhani menolak agama dimasukkan sebagai salah satu factor pendorong terorisme, pendorong terorisme menurutnya bukan agama tapi ideologi. Lihat Ahmad Najib Burhani, “Globalized and localized terrorism”, *The Jakarta Post* (June 8, 2010).

perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mestinya menjadi rahmat karena akan menjadikan umat memiliki banyak pilihan, juga bisa dijadikan entri poin untuk mendorong budaya toleran terhadap perbedaan. Sembilan puluh persen kalangan pesantren menentujui sikap ini.

Pesantren juga perlu mendidik santrinya bahwa berjuang atau berjihad melawan kedzaliman atau ketidakadilan tidak harus dilakukan dengan cara terror yang hanya akan membuat orang yang tidak berdosa ikut menjadi korban. Kedzaliman tidak harus dilawan dengan cara-cara kekerasan. Kedzaliman harus dilawan dengan upaya penegakkan hukum. Perjuangan politik, termasuk perjuangan untuk mendirikan Negara Islam bagi yang menganggapnya masih perlu, bisa dilakukan tanpa kekerasan yakni dengan cara-cara demokratis. Oleh karena itu perjuangan untuk mendirikan Negara Islam mesti bisa dilakukan dengan cara yang fleksibel yang sekiranya tidak melanggar konstitusi maupun hak asasi manusia.

Kemudian mengingatkan kelompok teroris pada umumnya sudah termakan dengan pandangan bahwa Barat selalu dalam situsai konflik dengan dunia Islam, maka pesantren juga bisa menjadi lembaga pendidikan yang membuktikan bahwa hidup berdampingan dengan dunia Barat bukan sesuatu yang mustahil. Program pertukaran santri atau mahasiswa bisa menjadi salah satu pintu masuk yang bisa diupayakan oleh pesantren untuk mengurangi stigma negatif umat Islam terhadap Barat maupun Barat terhadap Islam.

Kesimpulan

Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, upaya mengoptimalkan peran pesantren dalam menangkal gerakan radikalisme dan terorisme bisa dilakukan dengan cara meningkatkan wawasan pesantren melalui kajian-kajian yang lebih komprehensif yang tidak hanya menyangkut pemikiran aqidah dan fikih semata tapi juga menyangkut pemikiran filsafat dan tasawuf.

Kepada pesantren juga perlu diperkenalkan teologi yang lebih inklusif, akomodatif, dan lebih toleran terhadap perbedaan pandangan atau pendapat. Pengembangan budaya demokrasi yang mendapatkan dukungan tinggi dari pesantren perlu terus dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut dengan cara memperkuat alasan-alasan teologis yang bisa digunakan. Pesantren juga perlu dikembangkan sebagai pusat budaya dan pertumbuhan ekonomi supaya kalangan pesantren bisa merasa lebih menyatu dengan lingkungan sekitarnya, tidak teralienasi oleh kehidupan modern. Adalah penting untuk melibatkan pesantren dalam politik kebangsaan atau politik kerakyatan. Adalah penting untuk memberikan kesempatan dan peran kepada pesantren dalam ikut membangun bangsa. Adapun keterlibatan pesantren dalam politik praktis sebaiknya dihindari. Sejarah sering mencatat bahwa masuknya pimpinan pesantren pada

wilayah politik kekuasaan atau wilayah politik praktis sering membawa kemunduran atau kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pesantren.[]

Daftar Pustaka

- Abd Rahman, Musthafa. "Mengapa Penganut Al-Qaeda Tidak Surut?," *KOMPAS*, 17 Januari 2010.
- Bev, Jennie S. "Doubt and why good people do bad things," *The Jakarta Post* (September 23, 2010).
- Burhani, Ahmad Najib. "Globalized and localized terrorism", *The Jakarta Post* (June 8, 2010).
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Ismail, Noor Huda. *The Jakarta Post Youth Speak*, Vol. 2 (September 2009).
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1988.
- Munajat. "Debunking myths of terrorism," *The Jakarta Post* (September 8, 2009).
- Panitia Penyusun. *K.H. Imam Zarkasyi dari Gontor*. t.tp: t.p., t.th.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Tafsir, Ahmad. "Negara Sekuler Yang Mementingkan Agama," dalam 'Ali 'Abdur Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Van Dijk, C. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafitipers, 1987.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS, 2001.